

BAB II

LANDASAN TEORETIS

2.1 Kajian Teoretis

2.1.1 VOC

Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC adalah kongsi dagang terbesar asal Belanda yang pada abad ke-17 menguasai pusat perdagangan di wilayah Asia. Pada waktu itu, VOC melakukan monopoli secara masif terhadap jalur perdagangan rempah-rempah. Ada beberapa fakta menarik di mana VOC ini memiliki tentara dan diperbolehkan melakukan negosiasi dengan negara-negara lain yang membuat seolah-olah VOC seperti negara di dalam negara.³ Selain itu, VOC ini memiliki enam bagian wilayah kota, yaitu ada di Amsterdam, Middelburg, Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam.

Walaupun VOC adalah badan atau institusi dagang umum, namun memiliki legitimasi penuh dari negara dengan diberikannya berbagai fasilitas-fasilitas. Jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia, ada fenomena di mana perdagangan rempah-rempah dikuasai oleh Portugis pada abad ke-16.⁴ Portugis bekerja sama dengan Jerman, Spanyol, dan Italia yang menggunakan kota Hamburg sebagai pelabuhan sentral dalam mendistribusikan barang di Asia. Belanda akhirnya melakukan ekspedisi

³Charles R. Boxer, *The Dutch Seaborne Empire 1600-1800* (Hutchinson, 1965)- Sebuah karya klasik yang membahas secara menyeluruh tentang ekspansi maritim Belanda, termasuk VOC, dan dampaknya diseluruh dunia.

⁴Charles Corn, *The Scents of Eden: A History of the Spice Trade* (Kodansha International, 1999)- Buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sejarah perdagangan rempah-rempah dan persaingan antara bangsa-bangsa Eropa, termasuk peran Portugis.

dengan empat kapal besar yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman menuju Indonesia, ini juga menandai awal kedatangan Belanda ke Indonesia dan berlabuh ke Banten.

Sejarah lahirnya VOC dimulai ketika Belanda sampai di Indonesia pada tahun 1596 dan langsung mendirikan perusahaan dagang. Akan tetapi, lahir persaingan yang ketat antar pedagang Belanda. Hal ini ditengarai oleh persaingan harga rempah-rempah dan di lain sisi harga rempah-rempah di Eropa juga merosot. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka didirikanlah perusahaan dagang bernama *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)*.

VOC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dagang pada tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal pertama dari VOC adalah Pieter Both dan tidak berlangsung lama digantikan oleh Jan Pieterszoon Coen. Ada tiga tujuan utama didirikannya VOC, yaitu menyaingi perusahaan dagang Inggris di India, yaitu East India Company (EIC), menguasai pelabuhan serta kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia.

Di masa kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen, VOC berkembang pesat dan berhasil menguasai rempah-rempah di beberapa wilayah di Indonesia. Beberapa kebijakan VOC yang sangat merugikan rakyat Indonesia, yaitu melaksanakan "Pelayaran Hongi", yaitu pelayaran yang menyusuri pantai dengan dilengkapi oleh armada perang untuk mengawasi pedagang agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain, menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk agar produksi rempah-rempah

tidak berlebihan, dan mewajibkan rakyat Indonesia untuk membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik. Pendekatan politik digunakan untuk memahami sejarah VOC dan Kerajaan Mataram Islam melalui struktur kekuasaan, konsep-konsepnya, cara-cara memperoleh, menjalankan dan mempertahankan kekuasaan. Upaya untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan dapat ditempuh dengan berbagai cara, seperti memanipulasi, penulisan karya sastra babad seperti yang dilakukan oleh raja-raja Mataram sebagai sarana legitimasi untuk mendudukkan seseorang sebagai pengganti penguasa yang sah.

Secara historis, interaksi antara VOC dengan Kerajaan Mataram menghasilkan sebuah hal yang disebut intervensi dari salah satu pihak yang kuat. Intervensi dapat berarti suatu campur tangan individu maupun kelompok dalam urusan yang sebenarnya bukan haknya. Huala Adolf memberikan bentuk teori intervensi, berupa definisi intervensi sebagai “campur tangan secara diktator oleh suatu negara (kelompok tertentu) terhadap urusan dalam negeri negara lain dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah kondisi, situasi atau hasil komoditas berupa barang di negara tersebut” . Teori tersebut digunakan oleh peneliti sebagai acuan berfikir, bagi penelitian.

Lebih jauh Huntington juga menyatakan bahwa di antara faktor-faktor penting yang menyebabkan intervensi adalah struktur kelembagaan intern yang kacau dan juga ketidakstabilan politik yang terjadi dalam

masyarakat. Kondisi politik memainkan peranan yang signifikan terhadap munculnya intervensi.

Ketidakstabilan politik pada suatu pemerintahan tidak hanya akan mengurangi efektivitas pemerintahan, namun juga dapat mengundang intervensi, hal ini disebabkan intervensi muncul karena suatu dorongan dari situasi dan kondisi politik yang sedang terjadi. Ibnu Khaldun juga telah menyoroti masalah ini, yaitu bagaimana para penguasa Islam di Asia Barat, Afrika Utara dan Spanyol, menandalkan diri pada kekuatan militer dan politik tertentu dalam menegakkan tahta, contohnya adalah Dinasti Umayyah pada keluarga Marwan dan Dinasti Abbasiyah pada kekuatan Seljuk.

Suksesi mengisyaratkan terjadinya pergantian kekuasaan. Pergantian kekuasaan disini adalah orang yang secara legitimatif berhak untuk menduduki sebuah jabatan untuk menggerakkan kekuasaan. kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak pada orang lain, untuk membuat orang lain melakukan tindakan seperti yang dikehendaki oleh pemegang kekuasaan itu. Makna pokok kekuasaan itu terjadi oleh karena kekuasaan itu tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Di sini berarti bahwa kekuasaan itu berada pada puncak strata sosial, dalam hal ini raja. Pembagian (pelimpahan) kekuasaan dalam paham Jawa, memang dapat berubah. Perubahan pembagian (pelimpahan) kekuasaan itulah yang merupakan bentuk suksesi.

2.1.2 Kerajaan Mataram Islam

Kerajaan Mataram Islam berdiri tahun 1586. Kerajaan Mataram ini awalnya hanyalah sebuah kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang.⁵ Setelah Pajang runtuh, Sutawijaya mendeklarasikan Kerajaan Mataram. Deklarasi Kerajaan Mataram Islam ini bermula setelah Sutawijaya berhasil membunuh Sultan Pajang, Arya Pangiri. Setelah Sultan Hadiwijayameninggal, tahta Pajang yang seharusnya jatuh kepada Pangeran Benawa sebagai putra Mahkota Pajang, direbut oleh Arya Pangiri. Tidak terima atas perlakuan Arya Pangiri yang merebut tahta sekaligus membunuh putra mahkota Pajang, Sutawijaya melancarkan serangan ke Pajang dan berhasil merebut kembali tahta Pajang. Tahta Kerajaan Pajang itu pun dapat diselamatkan oleh Sutawijaya dengan memindahkannya ke Mataram. Sutawijaya mengganti nama Kerajaan Pajang dengan kerajaan baru bernama Mataram.

Sekilas dapat diketahui bahwa Kerajaan Mataram Islam tidak bisa dilepaskan dari dua kerajaan sebelumnya, Demak dan Pajang. Dua kerajaan Islam ini merupakan pewaris kerajaan Majapahit. Oleh karena itu Kerajaan Mataram Islam juga merupakan pewaris tahta kerajaan Majapahit, dan raja-raja Mataram adalah keturunan dari raja-raja Majapahit.

Kelahiran Kerajaan Mataram Islam memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Sejak awal berdirinya, Mataram mengklaim dirinya sebagai satu-satunya kerajaan yang sah di seluruh Jawa. Dengan klaim itu, maka tidak

⁵Slamet Muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara (LKIS, 2005)

mengherankan bila ekspansi teritorialnya, khususnya di wilayah-wilayah pesisir dimana ulama menjadi penguasa sekaligus pedagang, merupakan perhatian utama para raja Mataram. Hampir semua wilayah Jawa bagian tengah dan timur tunduk dibawah kekuasaan Mataram, kecuali Blambangan yang tetap bertahan dan belum memeluk agama Islam seperti yang dicitakan Sutawijaya.

Mataram yang tidak berhasil menaklukkan Blambangan, namun Kerajaan Mataram Islam pada masa keemasannya pernah menyatukan seluruh tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura, dibawah kekuasaannya. Ketika kolonialisme Barat (dalam hal ini VOC) mulai menginvasi Nusantara, tepatnya Jawa Barat, raja-raja Mataram Islam juga melawan dan memerangi VOC yang berpusat di Batavia (Jakarta sekarang). VOC masuk ke Batavia pada tahun 1619 setelah berhasil merebut wilayah Jayakarta dari Kesultanan Banten. Jayakarta merupakan wilayah di bagian barat pulau Jawa yang belum ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram Islam.

Mataram yang sempat menentang keras pendudukan VOC, akhirnya harus menerima bantuan VOC pada masa-masa akhir menjelang keruntuhannya. Terpecahnya kerajaan Mataram menjadi dua juga tidak lepas dari peran serta VOC, dan VOC adalah pihak yang paling diuntungkan dengan runtuhnya Mataram tersebut. Dalam hal ini, VOC menerapkan perjanjian Giyanti dalam upaya untuk memecah Kerajaan Mataram Islam menjadi dua.

Kerajaan Mataram merupakan suatu kerajaan yang sangat kuat

kekuasaannya atas Pulau Jawa sebelum mengalami perpecahan dalam persetujuan Giyanti pada 13 Februari 1755. Sebagai contoh adalah pada masa Sultan Agung. Wawasan politik Sultan Agung sangat luas dan jauh ke depan. Perekonomian pun maju pesat baik dari sektor agraris maupun maritim. Kejayaan Mataram dalam sektor maritim terbukti dari upaya serangan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia melalui Pantai Utara Jawa. Sultan Agung menyerang VOC di Batavia hingga dua kali, yaitu tahun 1628 dan 1629. Sultan Agung menjadi sosok yang diagungkan oleh raja-raja penerus dinast Mataram, di antaranya adalah Sri Sultan Hamengkubuwana IX yang bertahta di Kasultanan Yogyakarta.

Kejayaan Mataram yang diusahakan oleh Sultan Agung kini telah memudar. Mataram terpecah menjadi dua bagian yang kemudian pada saatnya nanti juga terpecah lagi menjadi empat bagian (Paku Alaman dan Mangkunegaraan). Terpecahnya kerajaan besar ini tentunya akibat hausnya penguasa akan kekuasaan serta adanya politik bangsa Belanda (VOC) untuk menguasai Mataram. Dengan strategi *divide et impera* atau dengan kata lain memecah belah serta mengadu domba, membuat VOC mudah mencapai tujuannya.

Sekitar tahun 1745, terjadilah pemberontakan di Kerajaan Mataram yang dilakukan oleh Mas Said dan Martopuro. Pakubuwana II menjanjikan akan memberikan daerah Sukawati (wilayah Sragen sekarang) bagi yang mampu menumpas pemberontakan tersebut. Kemudian Pangeran Mangkubumi bersedia memadamkan pemberontakan itu. Pangeran

Mangkubumi adalah putera Prabu Amangkurat IV dengan permaisuri yang kedua (Ratu Tejawati), sedangkan penguasa Mataram waktu itu adalah putera Amangkurat IV dari permaisuri yang pertama (Ratu Kencana) yang setelah naik tahta bergelar Pakubuwana II.

Setelah Pangeran Mangkubumi menjalankan tugasnya, ternyata Pakubuwana II mengingkari janjinya. Dengan adanya hal ini menyebabkan Pangeran Mangkubumi bersama Mas Said berbalik melawan Pakubuwana II. Perselisihan ini berlangsung bertahun-tahun hingga Pakubuwana II wafat karena sakit keras. Sebelum wafat, sang raja telah mengadakan perjanjian dengan VOC bahwa Kerajaan Mataram dititipkan kepada VOC untuk mengatur warisan kepada anak keturunan Raja agar tidak terjadi perselisihan. Dengan adanya hal ini seolah kekuasaan Mataram kini berada di tangan VOC, meski Putera Mahkota telah dinobatkan sebagai raja dengan gelar Pakubuwana III.

Pada tahun 1755 pihak VOC menyadari betapa sulitnya mematahkan perlawanan Mangkubumi dan Mas Said serta betapa banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk memerangi pemberontakan tersebut. VOC mendekati Pangeran Mangkubumi untuk mengadakan perundingan perdamaian tanpa Mas Said. Perundingan tersebut menghasilkan sebuah Perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, yang isinya antara lain, bahwa Pangeran Mangkubumi akan diberi sebagian daerah Mataram dan bahwa bangsawan tersebut diakui sebagai raja di Yogyakarta dengan bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana I.

Peristiwa pasca Perjanjian Giyanti 1755 M, merupakan suatu fenomena pada masa perjalanan sejarah Kerajaan Mataram Islam. Walaupun pada dasarnya peristiwa-peristiwa itu sudah dimulai pada masa Amangkurat I, namun kejadian yang hampir memporak porandakan wilayah dan pembunuhan secara besar-besaran berkejolak pada Pakubuwana II 1740 M. Dalam keadaan sulit, Pakubuwana II seringkali tidak mampu mengambil sikap dan keputusan yang tegas. Ketika terjadi peristiwa geger Pacinan 1740-1746 M, sikap diskriminatif orang-orang Belanda pada waktu itu, menimbulkan pemberontakan orang-orang Cina secara besar-besaran. Pergolakan politik semakin meningkat dengan munculnya para pemberontak yang dipimpin Mas Garendi untuk menghancurkan Kerajaan Kartasutra.

Perjanjian Giyanti, melatar belakangi pecahnya dinasti Mataram. Berawal dari Pangeran Mangkubumi yang menuntut janji Pakubuwana II, bahwa ia akan menyerahkan 3000 cacah tanah di Sukowati apabila berhasil meredam pemberontakan Pangeran Sambernyawa. Akhirnya Mataram harus dipecah menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat melalui perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara VOC, pihak Mataram (diwakili oleh Sunan Pakubuwana III), dan pihak pemberontak dari kelompok Pangeran Mangkubumi yang menjadi solusi bagi salah satu kerusuhan yang terus terjadi di Mataram. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 ini secara de facto dan de jure menandai memudarnya Kerajaan Mataram. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini,

yaitu di Desa Giyanti (sekarang tempat itu berlokasi di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo), di tenggara kota Karanganyar, Jawa Tengah.⁶

Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi dua: wilayah di sebelah timur Kali Opak (melintasi daerah Prambanan sekarang) dikuasai oleh pewaris tahta Mataram (yaitu Sunan Pakubuwana III) dan tetap berkedudukan di Surakarta, sementara wilayah di sebelah barat (daerah Mataram yang asli) diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul, bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan.

Peta pembagian Mataram setelah Perjanjian Giyanti dan didirikannya Mangkunagaran pada tahun 1757 menurut dokumen register harian N. Hartingh (Gubernur VOC untuk Jawa Utara), pada tanggal 10 September 1754 N. Hartingh berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru pada 22 September 1754. Pada hari berikutnya diadakan perundingan yang tertutup dan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Ronggo. Hartingh didampingi Breton, Kapten Donkel, dan sekretaris Fockens. Yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani. Pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram. N. Hartingh menyatakan keberatan karena tidak

⁶M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c. 1300* (Stanford University Press, 2008)

mungkin ada dua buah matahari. Mangkubumi menyatakan di Cirebon ada lebih dari satu Sultan. Hartingh menawarkan Mataram sebelah timur diberikan kepada Pangeran Mangkubumi, usul ini ditolak sang Pangeran Mangkubumi.

Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan diantara mereka. Akhirnya setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji maka pembicaraan menjadi lancar. Kembali Gubernur VOC mengusulkan agar Mangkubumi jangan menggunakan gelar Sunan, dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai oleh beliau. Mangkubumi berkeberatan melepas gelar Sunan karena sejak 5 tahun lalu diakui rakyat sebagai Sunan. (Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sunan (Susuhunan, yang dijunjung) atas kerajaan Mataram ketika Pakubuwana II wafat di daerah Kabanaran, bersamaan VOC melantik Adipati Anom menjadi Pakubuwana III).

Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya pada tanggal 23 September 1754, akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapatkan setengah Kerajaan. Daerah Pantai Utara Jawa (orang Jawa sering menyebutnya dengan daerah pesisiran) yang telah diserahkan pada VOC (orang Jawa sering menyebut dengan Kompeni) tetap dikuasai VOC dan ganti rugi atas penguasaan Pantura Jawa oleh VOC akan diberikan setengah bagiannya pada Mangkubumi.

Pangeran Mangkubumi memperoleh setengah dari pusaka-pusaka

istana. Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan pada Pakubuwana III. Pada 4 November tahun 1754, Pakubuwana III menyampaikan surat pada Gubernur Jenderal VOC Mossel atas persetujuan beliau dari hasil perundingan N. Hartingh (Gubernur Jawa Utara) dan Mangkubumi. Berdasarkan perundingan 22-23 September 1754 dan surat persetujuan Pakubuwana III maka pada 13 Februari 1755 ditandatangani Perjanjian di Giyanti.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Karya tulis tentang Kerajaan Mataram Islam sudah banyak ditemui, baik karya tulis akademik dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, dan disertasi, maupun tulisan populer dalam bentuk artikel dan tulisan bebas, namun karya-karya yang ada (baik penulis dari dalam dan luar negeri) lebih banyak membicarakan tentang eksistensi kerajaan dalam bentuk silsilah. Diakui atau tidak, memang telah banyak tulisan tentang pengaruh VOC di dalam tahta Kerajaan Mataram, namun sejauh ini, masih banyak dalam tahap deskripsi naratif saja, belum banyak karya tulis yang menyentuh sisi sistematis dan terstruktur dalam ranah akademik, khususnya dalam hal ini adalah penelitian berbentuk skripsi. Pada bagian inilah, peneliti menganggap perlu untuk diadakan kajian lebih komprehensif, yang merupakan salah satu celah untuk mengkaji Kerajaan Mataram dari sisi politiknya.

Tulisan-tulisan tentang Kerajaan Mataram berikut pengaruh VOC terhadap tahtanya, ada di beberapa tulisan utama, di antaranya: Buku karya C.R Boxer, Jan Kompeni, Sejarah VOC dalam Perang dan Damai, 1602-1799, yang didalamnya mengulas perjalanan sejarah VOC di Nusantara, meskipun bahasan tentang

hubungan dan intervensi VOC ke Mataram kurang komprehensif, namun cara pandang VOC sebagai golongan pedagang yang berusaha meraup keuntungan sebanyak mungkin, patut dijadikan acuan pemikiran. Faktor spasial dan batasan temporal kiranya menjadi pembeda yang paling utama dari penelitian yang akan dilakukan.

Soemarsaid Moertono dengan karyanya yang berjudul Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau, Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX. Buku ini membahas tentang perjalanan kekuasaan kerajaan Mataram II (Mataram Islam), yang memuat tentang sistem pemerintahan Mataram dijalankan sejak berdirinya hingga akhir pemerintahan Kolonial dan datangnya Jepang. Karya itu juga mengulas tentang usaha-usaha dari penguasa (raja) secara personal, dalam memperlihatkan dan mempertahankan kekuasaan, kebesaran, kemegahan dan kekuatan negaranya. Pembeda yang utama dengan penelitian ini, adalah masalah temporal serta fokus utamanya yaitu masalah intervensi VOC, sedangkan buku tersebut fokus utamanya adalah tentang pelaksanaan dari doktrin sistem politik Mataram oleh para raja.

Karya tulis selanjutnya berjudul; Konsep Kekuasaan Jawa, Penerapannya Oleh Raja-Raja Mataram, karya G. Moedjanto. Buku tersebut menjelaskan tentang konsep-konsep kekuasaan di Jawa baik secara umum maupun khusus. Secara jelas buku ini juga menjelaskan sistem serta penerapannya pada kekuasaan Jawa oleh raja-raja Mataram. Karya ini hanya membahas tentang sistem dan konsep saja, hanya sedikit saja membicarakan masalah perubahan dari intervensi VOC, batasan temporal juga menjadi faktor pembeda yang utama dari tulisan ini.

H.J. de Graaf dengan karya-karyanya tentang Mataram di abad ke-17, seperti tentang awal berdirinya Mataram, sejarah ekspansi Sultan Agung dan perpecahan Mataram di bawah Amangkurat I, juga karya terbesarnya yang berjudul, *Terbunuhnya Kapten Tack, Kemelut di Kartasura Abad XVII*, menggambarkan tentang peristiwa persinggungan Mataram dengan VOC mulai dari awal, hingga dengan aksi militer besar di abad ke-17. Pada tahap inilah VOC mulai dianggap sebagai biang keladi dari perpecahan Mataram, sejak bantuannya pertama kali di tahun 1677. Fokus temporal menjadi pembeda yang utama, di samping itu pula, tulisan ini fokus pada intervensi VOC yang berkesinambungan sejak tahun 1677 hingga 1757.

Karya selanjutnya yaitu, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792; Sejarah Pembagian Jawa*, yang ditulis oleh M. C Ricklefs dalam buku tersebut dijelaskan tentang sejarah timbulnya konflik antara VOC dengan Mataram yang berakhir dengan pembagian Kerajaan. Secara jelas juga diuraikan tentang peralihan menuju pemisahan wilayah secara damai dan terbentuknya Yogyakarta. Fokus spasial dan batasan temporal merupakan pembeda utama, selain dari pada masalah sistematika dalam pembahasan yang ada dalam tulisan ini.

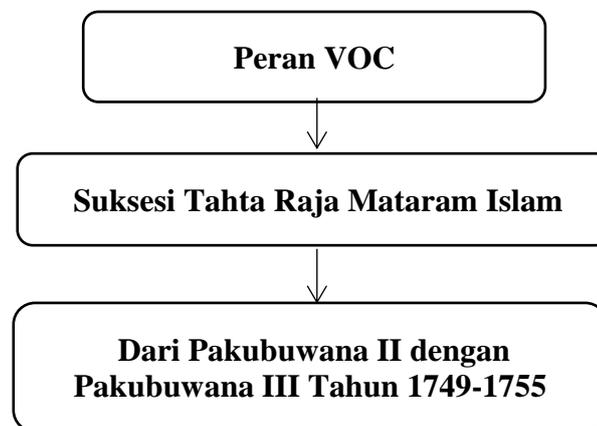
Karya-karya di atas mewakili sebagian dari beragam karya tulis, baik dari para sejarawan maupun pengkaji ilmu lain di ranah Kerajaan Mataram, yang dijadikan acuan berpikir untuk membedah sejarah Kerajaan Mataram, terutama celah kajian yang terfokus pada intervensi asing yaitu VOC.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep

yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematika penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

Kerangka konseptual yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah Peran VOC dalam suksesi Tahta Raja Mataram Islam dari Pakubuwana II dengan Pakubuwana III tahun 1749-1755. Kerangka konseptual tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Tabel 2.1
Kerangka Konseptual

VOC yang bermarkas besar di Batavia, pernah dua kali mendapat serangan dari Kerajaan Mataram Islam dibawah pimpinan Sultan Agung. Walaupun dua serangan tersebut mengalami kegagalan namun cukup membuat gentar VOC. Dengan berbagai strategi, VOC berusaha untuk bisa masuk ke lingkungan Kerajaan Mataram. Sepeninggal Sultan Agung kepemimpinan di Kerajaan Mataram mengalami gangguan dari masa ke masa, termasuk timbulnya konflik keluarga.